

## KEBIJAKAN *WORK FROM HOME* DALAM PANDANGAN REMAJA STUDI FENOMENOLOGI PADA REMAJA KAMPUNG AMBULEUIT, KECAMATAN KARANGTANJUNG, KABUPATEN PANDEGLANG.

Mochamad Adam Novianto

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jalan Raya Palka KM. 3 Sindangsari Kab. Serang Prov. Banten  
[mochamadadamnovianto@gmail.com](mailto:mochamadadamnovianto@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan *Work From Home* kepada remaja di Kampung Ambuleuit, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang. Fenomena ini dianalisa menggunakan studi fenomenologi dari Creswell untuk mengetahui secara jelas pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh remaja di Kampung Ambuleuit. Dengan begitu, informan yang diwawancarai oleh penulis merupakan informan yang didapatkan dengan menggunakan teknik *snowball* sehingga penulis dapat mendapatkan informan yang sudah pasti mengalami *Work From Home*. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa para remaja memiliki pandangan negatif terhadap *Work From Home* karena sangat menghambat kegiatan hingga pekerjaan mereka yang tidak bisa dilakukan secara luring, dengan adanya pandangan negatif ini para remaja tidak mematuhi kebijakan *Work From Home* sehingga akan berbahaya. Kesimpulan yang penulis temukan ialah bahwa pemangku kebijakan harus lebih memerhatikan proses berjalannya kebijakan serta perlu adanya petugas untuk melaksanakan hal tersebut.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pandangan, Remaja

### ABSTRACT

*This study aims to determine the impact of the Work From Home policy on adolescents in Ambuleuit Village, Karang Tanjung District, Pandeglang Regency. This phenomenon was analyzed using phenomenological studies from Creswell to find out clearly the experiences felt by adolescents in Ambuleuit Village. That way, the informant interviewed by the author is an informant obtained using the snowball technique so that the author can get informants who are definitely experiencing Work From Home. The results obtained in this study are that adolescents have a negative view of Work From Home because it greatly hampers activities to their work that cannot be done offline, with this negative view, teenagers do not comply with Work From Home policies so it will be dangerous. The conclusion that the author found is that policymakers must pay more attention to the process of implementing policies and the need for officers to implement them.*

**Keywords:** Policy, Viewpoint, Teenager

### I. PENDAHULUAN

Dinamika sosial perpolitikan di Indonesia selalu mengalami perubahan darimasa ke masa, hal tersebut dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Untuk memahami bahwa dinamika sosial politik di Indonesia berubah karena faktor eksternal, perlu kita lihat bahwasanya sistem sosial dan politik dapat berubah karena akibat dari keadaan luar seperti bencana alam, kerusakan infrastruktur, bahkan hingga kondisi terserang penyakit (DIansari, 2016). Salah satu kondisi dimana suatu aspek sosial politik di Indonesia dapat berubah karena adanya suatu penyakit dapat dilihat kasusnya pada penyebaran virus *Covid-19*. *Covid-19* merupakan suatu virus yang pada tahun 2019 sudah meneror masyarakat global, tak terkecuali Indonesia, virus yang menyebar melewati cairan dalam tubuh ini telah menyebabkan beberapa persoalan terhadap segala aspek di Indonesia termasuk aspek politik. Dengan begitu, pemerintah di Indonesia berusaha untuk

meminimalisir angka penyebaran virus ini dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan mengeluarkan berbagai regulasi berupa kebijakan publik.

Penetapan kebijakan publik merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk meminimalisir angka penyebaran *Covid-19*. Kebijakan ditetapkan karena adanya masalah yang terjadi diantara kondisi masyarakat maupun kondisi pemerintahan di Indonesia (Taufiqrokhman, 2014), kebijakan tersebut dalam perjalanannya perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan agar pemilihan kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif (Anggara, 2014).

Kebijakan (Policy) merupakan suatu asas atau pedoman tentang tata cara melakukan suatu tindakan, kebijakan sering digunakan dalam ranah politik, organisasi maupun pemerintahan. Dalam pengertiannya, kebijakan pada umumnya digunakan

untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlancar kehidupan baik dalam kehidupan berorganisasi maupun kehidupan pribadi. (Ramdhani & Ramdhani, 2017) Hal ini berbeda dengan hukum yang mana hukum berarti peraturan yang menuntut individu untuk melakukan tindakan yang apabila tidak dilakukan maka pelanggar akan mendapat hukuman. Sementara itu, lingkup kebijakan publik (Public Policy) sangatlah luas, kebijakan publik mencakup sosial, politik, budaya, dan ekonomi, sehingga kebijakan publik dapat bersifat nasional maupun regional. Easton dalam Taufiqurokhman menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai otoritatif kepada masyarakat, akan tetapi hanya pemerintah lah yang berhak secara otoritatif kepada masyarakat. (Taufiqurokhman, 2014)

Pada negara modern, tujuan utama kebijakan publik adalah sebagai pelayanan publik, yaitu upaya negara untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya disamping kewajibannya untuk menarik pajak dan retribusi.

Dalam masyarakat demokratis, kebijakan publik pada hakikatnya adalah cerminan dari opini publik, hal ini diperlukan untuk membentuk kebijakan yang efektif, untuk itu diperlukan beberapa hal agar terciptanya opini publik; (1) adanya perangkat yang jelas seperti peraturan perundang-undangan, hal ini agar publik mengetahui dengan jelas kebijakan yang telah dibentuk, (2) suatu kebijakan publik harus jelas struktur dan administrasinya, (3) diperlukan adanya mekanisme kontrol publik agar dalam pelaksanaannya tidak ada penyimpangan (Anggara, 2014). Akan tetapi dalam masyarakat otoriter, kebijakan publik merupakan output dari pemerintah secara keseluruhan tanpa melibatkan publik sehingga 3 perangkat diatas tidak terjadi.

Kebijakan publik merupakan suatu solusi yang harus dilakukan pemerintah dengan melihat kondisi yang menyebabkan permasalahan bersama dan bukan pribadi, dengan begitu jalannya kebijakan akan berdampak kepada masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja, seperti pada kebijakan Work From Home yang ditetapkan beberapa waktu lalu.

Work From Home atau WFH merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia agar bisa meminimalisir angka penyebaran virus Covid-19. Kebijakan ini memuat berbagai regulasi yang nantinya harus ditaati oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah melakukan aktivitas dari dalam rumah baik itu dalam bekerja, berbelanja, maupun melakukan aktivitas luar lainnya (Diananda, 2018). Dalam prosesnya menjalankan kebijakan tersebut, terdapat banyak polemik atau persoalan yang dihadapi oleh pihak pemangku jabatan diantaranya adalah belum siapnya masyarakat dalam menghadapi kehidupan sosial seperti itu, kurangnya kontrol dari pemerintah hingga tidak adanya fasilitas

yang mumpuni (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Permasalahan-permasalahan tersebut jelas teridentifikasi dalam pelaksanaan kebijakan Work From Home, terutama implementasinya pada kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat merupakan kehidupan terpenting dalam tatanan masyarakat karena hubungannya pada tujuan untuk hidup bersama (Jannah & Dewi, 2021). masyarakat pada tatanannya memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda daripada masyarakat lain sehingga muncul istilah masyarakat adat dan masyarakat secara umum, untuk itu perlu metode khusus untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan sosial masyarakat tersebut agar tidak terjadi polemik atau permasalahan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Kebijakan WFH ini berdampak kepada seluruh tingkatan masyarakat sosial dari nasional hingga masyarakat setingkat desa (Ma'rifah, 2020), bahkan pula berdampak kepada masyarakat di daerah kampung. Salah satu diantaranya adalah Kampung Ambuleuit, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Kampung Ambuleuit merupakan salah satu Kampung di Kabupaten Pandeglang yang daerahnya terdiri dari daerah pemukiman biasa warga dan daerah hunian perumahan yang disebut Komplek, kampung ini juga memiliki beragam sosial budaya masyarakat dan tingkatan masyarakat yang cukup lengkap dari masyarakat menengah kebawah hingga menengah keatas. Adanya tingkatan di masyarakat Kampung Ambuleuit ini menjadikan Kampung tersebut memiliki lingkungan sosial yang tenang dan jarang ada konflik, serta juga memiliki beragam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digiatkan oleh masyarakat disana seperti usaha menjual makanan, usaha menjual barang pokok hingga usaha jasa.

Adanya beragam sosial masyarakat di Kampung Ambuleuit juga mendorong para remaja yang tergabung ke dalam Karang Taruna untuk turut aktif dalam memberdayakan Kampungnya (Nuryati dkk., 2020), mulai dari adanya kerja bakti, mengadakan lomba-lomba di hari peringatan, hingga melakukan aktivitas keagamaan, sehingga dengan adanya aktivitas dari remaja-remaja ini menjadikan roda kegiatan di Kampung Ambuleuit berjalan dengan bagus. Namun, dengan adanya kebijakan WFH banyak dari kegiatan tersebut yang terhambat yang merupakan akibat dari aturan dimana kegiatan-kegiatan harus dikurangi sehingga remaja yang biasanya mengadakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan Kampung juga turut mengurangi aktivitasnya.

Dengan melihat kondisi yang terjadi di lapangan, maka dari itu peneliti akan mencoba mencari tahu bagaimana pandangan remaja di Kampung Ambuleuit, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang dalam melihat pelaksanaan kebijakan WFH.

## II. METODE

Penelitian dengan judul “Kebijakan Work From Home Dalam Pandangan Remaja: Studi Fenomenologi Pada Remaja Kampung Ambuleuit, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang.” yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif sendiri menurut Moleong dalam Ani Susanti menjelaskan adalah metode penelitian agar dapat lebih mudah memahami dan menganalisis fenomena berdasarkan pemahaman subjek penelitian dalam hal ini adalah remaja, pemahaman tersebut dapat berupa opini, pendapat, atau bahkan sudut pandang subjek terhadap objek penelitian (Susanti & Panason, 2021). Metode ini sesuai dengan apa yang nantinya akan dilakukan penulis dimana penulis akan membuka opini atau pandangan subjek penelitian terhadap suatu fenomena yang dalam hal ini adalah kebijakan Work From Home tersebut.

Sementara itu, dalam suatu metode perlu dilakukan suatu pendekatan, pada penelitian ini penulis memilih fenomenologi sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan fenomenologi menurut Creswell dalam Asbari dkk, adalah suatu pemaknaan yang diberikan suatu individu terhadap suatu fenomena yang dialaminya, dengan pemaknaan dari individu ini maka seorang fenomenologis dapat mereduksi pemaknaan tersebut menjadi sebuah deskripsi yang menjelaskan esensi dari fenomena tersebut (Asbari & dkk, 2020). Dengan demikian, fenomenologi bukanlah pendekatan yang berfokus kepada peristiwa atau fenomena melainkan kepada pemberian esensi suatu individu terhadap fenomena yang pernah ia alami.

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan objek penelitian (Firmansyah dkk., 2021). Dengan demikian dapat dipahami bahwa teknik wawancara merupakan komunikasi dua arah yang bertujuan untuk menanyakan hal-hal yang terkait untuk mendapatkan data penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam informan, dengan menggunakan teknik snowball, penulis menentukan satu informan dan penulis akan mencari informan lain sesuai dengan yang diarahkan oleh informan sebelumnya.

### 2. Observasi

Pada pelaksanaan penelitian, penulis melakukan sebuah pengamatan yang dimaksudkan untuk melihat secara langsung maupun tidak langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi yang bersifat non-partisipan yang mana menurut Firmansyah, Masrun, dan Yudha, observasi non-partisipan adalah pengamatan

dimana penulis memposisikan dirinya hanya mengamati hal-hal tertentu saja (Firmansyah dkk., 2021). Dalam penelitian “Kebijakan Work From Home Dalam Pandangan Remaja: Studi Fenomenologi Pada Remaja Kampung Ambuleuit, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang.” penulis hanya mengamati bagaimana bentuk respon para remaja dalam menanggapi kebijakan WFH di daerahnya.

Instrumen penelitian yang biasanya dipakai dalam penelitian kualitatif merupakan peneliti itu sendiri, dimana peneliti ini memposisikan dirinya sebagai alat untuk penelitian, hal ini dikarenakan dalam melakukan wawancara, observasi, hingga pembuatan laporan dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Selain itu, narasumber atau objek penelitian juga turut menjadi komponen penting dalam penelitian dikarenakan dapat memberikan data yang relevan untuk dijadikan bahan penelitian.

Lokasi penelitian merupakan lokus yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian, dengan ini peneliti memiliki batasan dimana penelitian harus dilakukan. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada Kampung Ambuleuit, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti di lapangan, terdapat beberapa poin yang nantinya akan menjadi bahan analisis peneliti. Dalam masalah implementasi kebijakan publik yang dilakukan di Kp. Ambuleuit, Kecamatan Karangtanjung, masyarakat memang sudah mematuhi kebijakan tersebut pada awal mula kebijakan tersebut diterapkan. Seperti yang dijelaskan Haji Mesri selaku tokoh masyarakat yang ada di Kp. Ambuleuit

*“Masyarakat sendiri memang sudah menerapkan prokes-prokes, tapi hanya pada awal munculnya Corona saja, habis itu mungkin karena masyarakat cepat bosan maka kegiatan-kegiatan kembali dilakukan.” - ucap H. Mesri.*

Untuk memahami penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Haji Mesri tersebut, diperlukan data lebih lanjut mengenai pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masyarakat Kp. Ambuleuit. Dengan adanya pernyataan pengalaman-pengalaman dari beberapa masyarakat ini maka dapat diketahui apakah implementasi dari kebijakan WFH tersebut sudah tepat.

*“Ya memang karna kita dipaksa buat tetap di rumah terus sementara kan bahan sembako cepat habis jadi mau enggak mau kita keluar buat beli makanan, sembako”*

*...“Soalnya disini (Ambuleuit) saya jarang di dalam*

*rumah, biasanya keluar ke rumah samping”*

*“Waduh kurang sreg aja saya kalo harus tetap di dalem rumah soalnya saya kerja dan kerjaan saya gabisa dari dalam rumah”*

*“Iya sih makin kesini makin ngelanggar, Cuma ya mau bagaimana kalo masyarakatnya udah jenuh”*

*“iya biasanya sebelum Corona emang saya sama tetangga suka kumpul-kumpul, masa enggak boleh kalo sekadar ngobrol aja”*

Pernyataan-pernyataan diatas menandakan bahwa pelaksanaan Work From Home (WFH) di lingkup yang lebih kecil seperti dalam hal ini adalah lingkup Kampung menjadi persoalan tersendiri, hal ini disebabkan karena masyarakat cepat merasa jenuh apabila terus dipaksa untuk tetap di rumah, selain itu faktor kebiasaan menjadi pengaruh yang besar seperti apabila sebelum adanya kebijakan WFH diberlakukan, masyarakat masih nyaman dengan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat lainnya sehingga tetap berada di dalam rumah menjadi hal yang kurang nyaman untuk masyarakat tersebut.

Selain permasalahan dalam implementasi kebijakan di lingkungan masyarakat tersebut, permasalahan juga dialami oleh pemuda di Kp. Ambuleuit, dimana permasalahan tersebut terdiri dari berkurangnya kegiatan-kegiatan para remaja tersebut seperti yang dijelaskan Fikram selaku tokoh karang taruna Kp. Ambuleuit.

*“Memang betul berkurang, malah banyak berkurangnya, seperti kami biasanya kalau malam-malam suka menjaga pos ronda, terus kalau ada warga yang kesusahan kami melakukan bakti sosial”*

*...”apalagi kalau perayaan begitu, yang biasanya 17-an kita melakukan perlombaan, ini enggak ada, terus kalau ada Maulid Nabi yang biasanya kita juga dari pemuda yang memeriahkan, tahun ini enggak bisa semeriah dulu.” Ucap Fikram.*

Berkurangnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para remaja tersebut merupakan dampak lain dari diberlakukannya kebijakan WFH. Kebijakan ini memungkinkan seluruh aktivitas warga dilakukan di dalam rumah termasuk para remaja tersebut, di sisi lain terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan para remaja tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya.

*“Utamanya sih karena Work From Home ya, ditambah dari RT nya juga memaksa kami jangan berkumpul-kumpul”*

*...”kurang tahu juga sih selain gara-gara WFH kenapa pemuda enggak bisa ngadain kegiatan lagi, cuma memang keadaan aja yang memaksa kami.”*

*“Kalau dilihat-lihat sih begitu, meskipun sekarang warga-warga tetap ngumpul, bergosip, tapi karena posisi kita yang masih pemuda lah jadi mau enggak mau harus nurut”*

*...”Saya sendiri memang sering main keluar aja gitu, kumpul sama teman, tapi kalau ada kegiatan yang besar kaya lomba-lomba atau hari raya gitu yang biasanya saya ikut mengadakan ya ditiadakan sama pihak RT karna kalau ada kegiatan gitu-gitu harus ada izin kan ke RT”*

Dapat dilihat dari penjelasan dari remaja-remaja karang taruna Kp. Ambuleuit tersebut bahwa kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh para remaja Kp. Ambuleuit tidak bisa dilakukan selain karena kebijakan WFH yang menjadi faktor utamanya juga karena tidak adanya izin dan kurangnya dukungan dari masyarakat.

Terdapat pula pemaparan dari remaja-remaja biasa Kp. Ambuleuit yang menjelaskan mengapa kegiatan-kegiatan remaja karang taruna tidak bisa dilakukan kembali saat pemberlakuan WFH. Pemaparan ini juga sekaligus menjelaskan tidak hanya kegiatan pada acara besar saja yang tidak bisa dilakukan, tapi juga kegiatan-kegiatan remaja biasa semakin diminimalisir.

*“Iya enggak cuma karang taruna aja yang dibatasi, dari pemuda yang biasa juga kalau mau ada kumpul-kumpul kaya biasa suka ditegur sama warga”*

*...”dimarahin waktu itu saya ke rumah teman buat minjem barang aja, tapi waktu saya mau pulang malah liat di warung pada ngumpul gitu warganya”*

*“pernah tuh saya mau keluar gang, tapi kan kalau malam jam 9 an gangnya ditutup ya jadi enggak bisa lewat, tapi ga lama beberapa warga malah keluar masuk gang gitu”*

Dengan begitu, dapat diketahui hambatan-hambatan yang dialami baik dari remaja karang taruna maupun remaja biasa di Kp. Ambuleuit, hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah; (1) adanya penolakan dari pihak Kampung seperti RT maupun dari warga, (2) kurangnya dukungan dari warga-warga, (3) adanya kesalahpahaman diantara warga dan remaja. Diberlakukannya kebijakan WFH berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Kp. Ambuleuit, dimana para remaja baik dari pihak karang taruna maupun yang bukan tidak dapat bergerak leluasa ataupun bebas mengadakan kegiatan, hal tersebut bertolak belakang dengan perilaku warga-warga Kp.



Ambuleuit yang tetap melakukan kegiatan seperti interaksi sosial di lingkungannya. Hal ini pun dapat menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan WFH dimana permasalahan yang ada tidak hanya pelaksanaan yang belum efektif namun juga tidak tercapainya sasaran kebijakan dimana tidak semua warga Kp. Ambuleuit menaati kebijakan tersebut. Permasalahan lain pun muncul dimana terdapat kesenjangan antara warga dan para remaja, utamanya remaja Kp. Ambuleuit dikarenakan adanya perilaku yang bertolak belakang.

...”dibilang enggak setuju sih iya, kurang adanya kesetaraan disini, tapi ya itu tadi kita enggak bisa berbuat seenaknya berhubung kita juga tinggal disini”

“Pernah kok saya tegur warga yang ngumpul di warung, di tukang sayur, tapi saya nya malah ditegur balik katanya gapapa cuma ngobrol doang lagian bosen di rumah”

“Jangankan warga kak, RT nya sendiri saya suka liat di warung depan rumahnya lagi ngopi sama yang lain”

Permasalahan-permasalahan yang dialami para remaja tersebut kemudian dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan WFH tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, ditandai dengan dibatasinya kegiatan-kegiatan para remaja namun tidak halnya dengan para warga. Permasalahan ini pun dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada warga dan karena adanya kesenjangan remaja dengan warga maka kesalahpahaman juga semakin terjadi. Dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para remaja tersebut, dapat diketahui bahwa pandangan para remaja terhadap pelaksanaan kebijakan WFH negatif, terbukti dari adanya rasa ketidakadilan yang didapatkan para remaja karena warga yang seharusnya juga menaati kebijakan WFH malah merupakan aktor utama pelanggaran kebijakan. Meskipun begitu, dalam hal berkegiatan para remaja masih tetap mematuhi karena selain dari adanya kebijakan WFH itu sendiri juga karena adanya tekanan dari pihak warga maupun RT Kp. Ambuleuit.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya dapat dipahami bahwa selain dari pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) yang kurang efektif, dapat dilihat pula pandangan remaja Kp. Ambuleuit yang menandakan pandangan negatif, dimana para remaja tersebut diantaranya mendapatkan perlakuan kurang adil dari masyarakat yang seharusnya menjadi aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan ini malah menjadi aktor utama dalam pelanggaran kebijakan.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ternyata didasari dari beberapa faktor seperti cepat bosan, adanya kebiasaan interaksi sosial hingga kurangnya bahan-bahan sembako.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, penulis dapat menyarankan beberapa hal seperti:

1. Dibentuknya tim Satgas Covid-19 baik dari warga maupun remaja karang taruna untuk menjaga masyarakat tetap mematuhi kebijakan WFH.
2. Diperhatikan kembali kepentingan para remaja yang memiliki kepentingan tersendiri yang belum diketahui oleh masyarakat sekitar.
3. Diberlakukannya regulasi-regulasi yang lebih ketat seperti tidak boleh berkerumun lebih dari 2 orang.
4. Memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat agar kebutuhan sembako tercukupi sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Penerbit Pustaka Setia.
- DIansari, R. E. (2016). *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Taufiqrokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Bayumedia.

##### **Jurnal**

- Asbari, M., & dkk. (2020). Studi Fenomenologi Work-Family Conflict Dalam Kehidupan Guru Honorer Wanita. *Jurnal Pendidikan*, 4(1), 180–201.
- Diananda, A. (2018). Kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19. *ISTIGHMA*, 1(1), 116–132.
- Firmansyah, M., Masrun, & Yudha, I. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 156–159.
- Jannah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 931–936.
- Ma'rifah, D. (2020). Implementasi Work From Home: Kajian Tentang Dampak Positif, Dampak Negatif, dan Produktivitas Pegawai. *Civil Service Journal*, 14(2), 53–63.
- Nuryati, N., Suryandari, M., Vania, A., & Lasambouw. (2020). Analisis Ketaatan Masyarakat Usia Remaja Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19. *Social and Humanities*, 6(2), 519–527.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 10.
- Susanti, A., & Panason, A. A. (2021). Efektivitas

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan  
Pandemi Covid-19. *Journal of Public*

*Administration and Government*, 3(1), 9–14.